



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2022**

KECAMATAN TOMONI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Geografis	2
1.2 Data Umum Organisasi	3
1.3. Struktur/Kondisi Organisasi	6
1.4. Peran Organisasi	7
1.5. Isu Strategis.....	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian IKU Tahun 2022.....	22
Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	22
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	22
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir	24
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	25
4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	27
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	27
Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	36
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2022	36
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Beberapa Tahun Terakhir	37

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	39
4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	39
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya	40
Tabel 3.7	40
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya	40
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	40
BAB IV	54
PENUTUP.....	54
LAMPIRAN – LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	3
Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	4
Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	12
Tabel 2.2 APBD Perubahan Tahun 2022	13
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini.....	17
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	19
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah.....	21
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini.....	29
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2016-2021)	32
Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	41

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Tomoni dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Tomoni sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Tomoni Tahun 2022 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tomoni, Februari 2023

CAMAT TOMONI



CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
NIP. 19750901 200312 2006

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tomoni selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Tomoni diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Tomoni menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.1 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kecamatan Tomoni 230,09 km² atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Tomoni terdiri dari 12 (duabelas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan, dengan 52 dusun/lingkungan dan 117 RT. Adapun Desa/Kelurahan dimaksud masing-masing :

1. Kelurahan Tomoni
2. Desa Lestari
3. Desa Mulyasri

4. Desa Bayondo
5. Desa Beringin Jaya
6. Desa Kalpataru
7. Desa Tadulako
8. Desa Sumber Alam
9. Desa Ujung Baru
10. Desa Mandiri
11. Desa Bangun Jaya
12. Desa Bangun Karya
13. Desa Rante Mario

Jumlah Penduduk Kecamatan Tomoni pada tahun 2022 sebanyak 26.791 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2022) dengan rincian : laki-laki sebanyak 13.525 jiwa dan perempuan sebanyak 13.266 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 7.902 KK. Penduduk Kecamatan Tomoni merupakan penduduk yang heterogen baik suku maupun agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Tomoni yaitu Suku Jawa, Bali, Lombok, Batak, Bugis, Toraja, Pamona dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

1.2 Data Umum Organisasi

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Tomoni dan Kantor Kelurahan Tomoni per tanggal 31 Desember 2022 adalah 28 (dua puluh delapan) orang PNS dan 27 (dua puluh tujuh) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	1	1	-	-	2
2	Golongan III	11	5	1	1	18
3	Golongan II	-	-	1	7	8
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		12	6	2	8	28

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	1	1	-	-	2
2	Golongan III	-	13	3	2	18
3	Golongan II	-	1	-	7	8
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	15	3	9	28

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	2	8	18	28
2	Fungsional	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	2	8	18	28

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

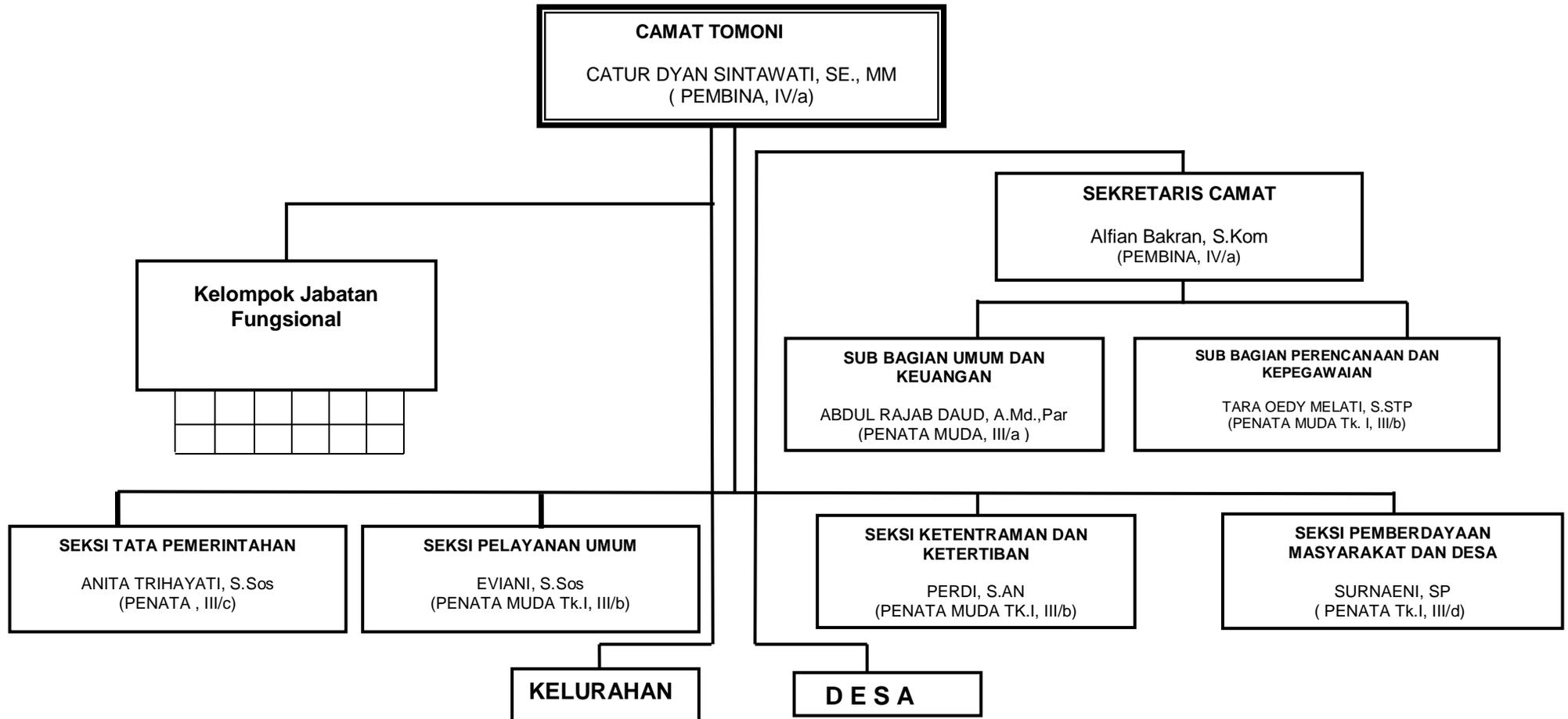
Tabel 1.4
Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	28
2	CPNS	-
3	PTT	-
4	UPAH JASA	27
JUMLAH		55

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.3. Struktur/Kondisi Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TOMONI



1.4. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.5. Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Tomoni tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Tomoni yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang

berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Tomoni.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

❖ **Visi dan Misi**

Pada dasarnya, rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Tomoni sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi-Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kecamatan Tomoni menyusun Perjanjian Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Renja Tahun 2022 dan DPA Tahun Anggaran 2022. Kecamatan Tomoni telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Camat Tomoni Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.699.995.397	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.745.500	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 272.842.800	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 8.999.213	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.158.900	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 33.848.740	APBD

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tabel 2.2
APBD Perubahan Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	2,745,500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	2,745,500
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	150 lembar	2,745,500
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	272,842,800
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	97,169,900
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100%	16,355,900
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13 Desa/ Kelurahan	80,814,000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	175,672,900
	Pembangunan sarana dan prasarana	100%	150,742,900
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	24,930,000
	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	8,999,213

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	5,999,768
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	2,999,793
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kali	2,999,975
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2,999,445
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kali	2,999,445
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	18,158,900
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	18,158,900
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100%	18,158,900
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	33,848,740
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100%	33,848,740

	Desa		
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	6,648,950
	Fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum	100%	10,203,500
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	12 Desa/ Kelurahan	16,996,290
Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4,699,995,397
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	9,961,500
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2,413,500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2,165,500
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2,165,500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	3,217,000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,895,245,677
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	2,887,234,677

	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	8,011,000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1,985,000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	1,985,000
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	28,980,000
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	12 Dokumen	28,980,000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	36,081,750
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Laporan	5,001,750
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	31,080,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	513,663,750
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Unit	6,085,350
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	3 Unit	22,750,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Orang	56,416,800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31099 Lembar	14,286,600

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 Exp	8,520,000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	8500 ktk	160,950,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Kali	244,655,000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	570,450,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	530,250,000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	140 unit	40,200,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	476,943,220
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat	27,486,860
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132 Rek	47,656,360
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	8,500,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Orang	393,300,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	166,684,500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	75,510,400
	Pemeliharaan Mebel	5 Unit	4,979,100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44 Unit	17,760,000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	68,435,000
JUMLAH		100%	5,036,590,550

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tomoni

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Pemerintah Kecamatan Tomoni yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026 KANTOR KEC. TOMONI

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Kuesioner	Seksi Pemerintaha, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Pelayanan Umum
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Nilai Lakip	Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Laporan Kegiatan	Seksi Pemerintaha, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Umum, Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan Subbagian Umum dan Keuangan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Transisi 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Persentase Peningkatan Nilai IKM (%)	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni		0,55	1,47	1,82	2,04	2,25	2,69	2,69
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	81	83	85	86	86
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Tomoni	Nilai LAKIP Kecamatan Tomoni (nilai)	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni		62	63	64	65	66	67	67
				Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1. Capaian IKU Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pencapaian terhadap IKU Kantor Kecamatan Tomoni akan digambarkan per Sasaran Strategis, sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan public di tingkat kecamatan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	115,42	146,10 %	Sangat Tinggi

Sumber :Seksi Pelayanan Umum

$$\text{Rumus : \% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

a. Analisis Capaian kinerja sasaran pertama sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian mencapai 146,10% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yangdicapai sudah baik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan Tahun 2022 Kecamatan Tomoni berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan menggunakan kuesioner yang mengajukan permohonan pelayanan yang dibagikan pada setiap pengunjung yang datang pada loket pelayanan Kecamatan Tomoni, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target 79 atau melampaui target dengan nilai survei 115,42 (daftar terlampir). Sasaran pertama yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Tomoni.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

- 1) Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai nilai **449**.

❖ **Faktor penghambat**, kecamatan tomoni pada unsur kompetensi pelaksana mendapatkan nilai paling rendah pada penilaian IKM disebabkan karena jumlah personil yang masih kurang dan kompetensi sumber daya manusia yang di nilai masih kurang. Sebab msaih di temukan pegawai di kantor kecamatan tomoni yang belum memahami dengan baik terkait segala macam prosedur pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, ahli waris, akta jual beli dan lain sebagainya.

❖ **Solusi** untuk permasalahan unsur kompetensi pelaksana adalah dengan memberikan pemahaman kepada para pegawai kantor kecamatan tomoni terkait persyaratan dan prosedur pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, ahli waris dan jenis pelayanan lain. sehingga tidak ada lagi pegawai kantor kecamatan yang tidak memahami prosedur pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan.

2) Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada unsur sarana dan prasarana dengan nilai **549**.

❖ **Faktor pendukung** Kecamatan Tomoni pada unsur sarana dan prasarana dalam pelayanan mendapat nilai tinggi, disebabkan karena kantor kecamatan tomoni telah berusaha memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

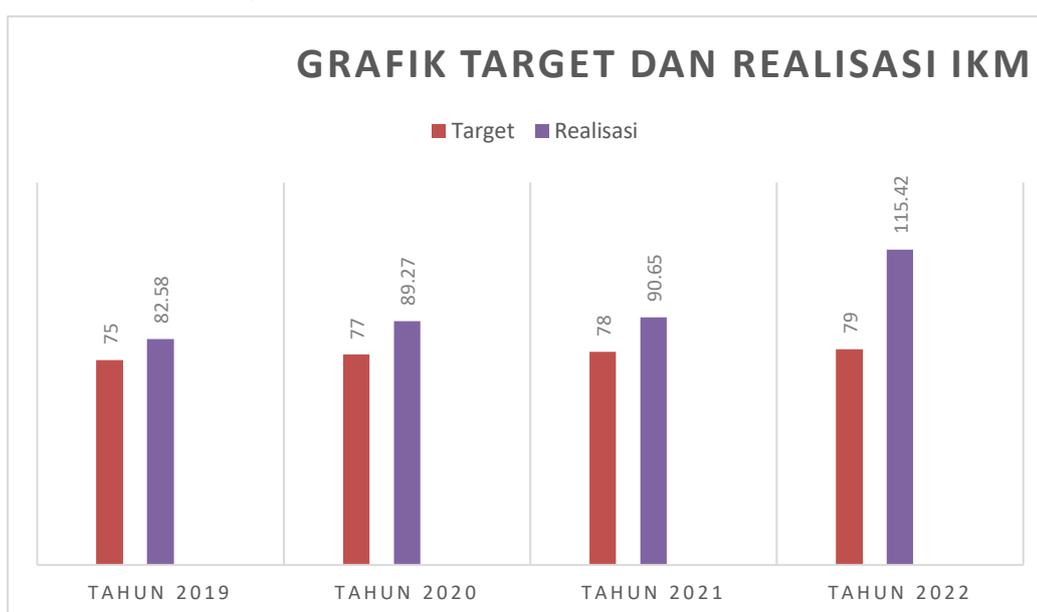
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2017	71	72,76	Sedang
2		2018	73	76,14	Tinggi
3		2019	75	82,58	Tinggi
4		2020	77	89,27	Tinggi
5		2021	78	90,65	Sangat Tinggi
6		2022	79	115,42	Sangat Tinggi

Sumber : Seksi Pelayanan Umum



Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan Tahun 2022. Pada setiap tahunnya realisasi Survei Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditentukan.

- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan 2022 Terhadap Target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2022	2022	
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	115,42	86

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Dengan melihat table capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi hingga tahun 2022 sebesar 115,42 atau setara dengan 146,10% dengan Predikat Sangat Tinggi, Target nilai IKM pada akhir periode Resntra 2021-2026 yaitu 86, jika Realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2022 adalah 134,20%. Target ditahun 2023 memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Tomoni untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tomoni dapat terwujud.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan.

Adapun hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Tidak semua pegawai di kantor kecamatan tomoni memahami tentang syarat dan prosedur pelayanan (dokumen kependudukan, perizinan, ahli waris, pengoperan hak tanah, akta jual beli dan yang lainnya).

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Tomoni dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu:

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada tahun 2021 kegiatan perizinan hanya dilakukan sampai dengan bulan Juli, sejak tanggal 2 Agustus 2021 tidak ada lagi pelaksanaan perizinan di Kecamatan, menunggu peraturan yang baru terkait pelaksanaan perizinan, untuk sementara pelaksanaan perizinan seperti IMB dan yang lainnya diambil alih oleh kabupaten.

❖ **Hambatan** : Belum ada peraturan yang baru terkait pelaksanaan pelayanan perizinan di kecamatan.

❖ **Solusi** : Tetap memberikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbaru.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat

1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Target pada sub kegiatan ini adalah persentase keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang mencapai 30%. Musrenbang Kecamatan Tomoni dilaksanakan pada Bulan Maret 2022, masing-masing Desa/Kelurahan mengusulkan sebanyak 7 kegiatan prioritas dengan total 91 usulan. Setelah dilakukan musyawarah dan verifikasi oleh BAPPEDA, usulan yang terealisasi pada tahun 2022 sebanyak 34 kegiatan prioritas.

- ❖ **Hambatan** : Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang.
 - ❖ **Solusi** : Memberikan pemahaman kepada tokoh perempuan terkait pelaksanaan musrenbang.
- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PKK pada 12 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Tomoni. Kegiatan PKK untuk tingkat Kecamatan yaitu :

- a) Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan;
- b) Memfasilitasi Program / Kegiatan PKK Desa/Kelurahan;
- c) Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh PKK Desa/Kelurahan.

Sepanjang tahun 2022 PKK kecamatan tomoni melakukan beberapa kegiatan diantaranya Lomba Kampung Organik, Lomba Dasawisma, Lomba Posyandu terintegrasi dan lomba senam lansia. Kegiatan PKK pada tahun 2022 sebagian besar berkaitan dengan penertiban administrasi PKK Desa/Kelurahan dan beberapa perlombaan baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

- ❖ **Hambatan** : Sumber Daya Manusia terbatas.
- ❖ **Solusi** :Melakukan bimbingan teknis bagi pengurus PKK untuk peningkatan Kapsitas Sumber Daya Manusia.

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di kelurahan tomoni pada tahun 2022 adalah pemeliharaan drainase.

❖ **Hambatan** : Terbatasnya anggaran.

❖ **Solusi** : Tetap melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Merekrut anggota linmas merupakan salah satu bentuk memberdayakan masyarakat di kelurahan tomoni.

❖ **Hambatan** : belum ada data berkaitan dengan kelompok masyarakat yang bisa di berdayakan di kelurahan tomoni.

❖ **Solusi** : membentuk dan mendata kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat mempermudah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tomoni.

C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Target pada sub kegiatan ini adalah persentase Upaya penyelesaian kasus penyelenggaraan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta

persoalan sosial lainnya yang di fasilitasi. Sepanjang tahun 2022 tidak ada kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban yang di selesaikan sampai di tingkat kecamatan, artinya persoalan ataupun sengketa di masyarakat mampu di selesaikan sampai pada tingkat desa.

❖ **Hambatan** : Pemerintah desa tidak pernah mengirimkan laporan ke kecamatan terkait kasus-kasus atau sengketa yang telah di selesaikan di tingkat Desa/Kelurahan ataupun laporan terkait kasus/sengketa yang harus di bawa sampai di tingkat kecamatan.

❖ **Solusi** : menyampaikan pada pemerintah desa untuk selalu menyampaikan kepada kecamatan (melalui persuratan) apabila ada kasus-sengketa yang telah di selesaikan di tingkat Desa/Kelurahan. Atau pun kasus yang harus di bawa sampai ke tingkat kecamatan.

b. Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Masyarakat

Target pada sub kegiatan ini adalah jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan. Sepanjang tahun 2022 pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan. Pertemuan paling banyak dilaksanakan ketika memasuki puasa, tahun baru ataupun hari-hari besar yang lain. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban di masyarakat.

❖ **Hambatan** : Pada umumnya tidak ada hambatan yang berarti pada pelaksanaan sub kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di kecamatan Tomoni selama tahun 2022.

❖ **Solusi** : Tetap berusaha menjaga keamanan dan ketertiban di kecamatan tomoni dengan melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban seperti melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Target pada sub kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi/sinergitas dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan.

❖ **Hambatan** : kurangnya informasi apabila ada peraturan baru yang diterbitkan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apabila ada aturan baru yang harus di patuhi.

❖ **Solusi** : Lebih aktif dalam mencari informasi berkaitan dengan aturan-aturan baru yang harus di sosialisasikan kepada masyarakat.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) adalah semua rekomendasi yang masuk dikecamatan

100% harus diselesaikan. Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimka dilakukan apabila terdapat persoalan yang harus dibahas oleh lintas sektor se-Kecamatan Tomoni. Berikut adalah beberapa hal yang dibahas dalam rapat Forkopimka Tahun 2022 :

- a) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait penanganan sampah dilingkungan Kecamatan Tomoni.
 - b) Rapat koordinasi berkaitan dengan persiapan pelaksanaan shalat Idul Fitri di Kecamatan Tomoni.
 - c) Persiapan HUT Republik Indonesia ke 76 di kecamatan Tomoni
 - d) Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan MTQ.
- ❖ **Hambatan** : Sinergitas antara FORKOPIMKA, pemerintah desa/kelurahan dan unit kerja lingkup Kecamatan Tomoni belum maksimal.
 - ❖ **Solusi:** Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi, rekomendasi dan koordianasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sehingga APBDes dapat dicairkan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 12 Rancangan Peraturan Desa dan 12 Rancangan Peraturan Kepala Desa dengan total 24 Peraturan yang dibuat oleh Desa sebelum memasuki tahun anggaran 2022, Rancangan Peraturan tersebut

kemudian diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Evaluasi kecamatan lalu dibuatkan surat pengantar untuk dapat di teruskan dan diverifikasi kembali oleh Dinas PMD, setelah diverifikasi, Rancangan Peraturan tersebut kemudian disahkan sebagai Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebelum APBDes dicairkan, Desa mengajukan Peraturan yang telah dibuat kepada Camat Tomoni untuk mendapatkan rekomendasi pencairan APBDes.

Pada pertengahan tahun berjalan akan terjadi perubahan anggaran sehingga desa akan membuat 12 Peraturan Desa (Perubahan) dan 12 Peraturan Kepala Desa (Perubahan). Sehingga total Peraturan terkait APBDes yang dibuat oleh desa selama 1 (satu) tahun adalah sebanyak 48 Peraturan. Pencairan APBDes dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun anggaran.

❖ **Hambatan :**

- a) Keterlambatan Informasi terkait aturan penyusunan APBDes.
- b) Peraturan Bupati terkait pagu indikatif terlambat ditetapkan.
- c) Belum adanya peningkatan kapasitas SDM di kecamatan terkait kegiatan perencanaan desa.

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait.
- b) Menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya.
- c) Pengusulan kegiatan bimbingan teknis perencanaan APBDes kepada SKPD terkait.

b. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan

Target dari subkegiatan ini adalah jumlah kawasan pedesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya. Kegiatan ini dilaksanakan bertahap dalam IV (empat) triwulan, dimana pada setiap triwulan akan menghasilkan 1 (satu) dokumen hasil monitoring dan evaluasi. Sehingga secara keseluruhan, dalam 1 (tahun) kegiatan ini akan menghasilkan 4 dokumen hasil monitoring dan evaluasi bagi desa yang mendapatkan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus).

❖ **Hambatan :**

- a) Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) merupakan hal yang baru di Kabupaten Luwu Timur sehingga masih di perlukan persamaan persepsi antara Desa, Kecamatan dan stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan ini.
- b) Aturan terkait pelaksanaan BKK terlambat di publikasikan, sehingga desa dan kecamatan yang secara teknis melaksanakan kegiatan mengalami beberapa kesulitan.

❖ **Solusi:**

- a) Menyatukan persepsi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
- b) Secara aktif mencari informasi terkait aturan-aturan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni, kaitannya dengan Pelaksanaan Tata Pemerintahan dilingkup kecamatan.

Sebagai catatan untuk Nilai SAKIP sampai saat laporan ini disusun, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur belum mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2022, sehubungan hal tersebut maka pengukuran capaian Indikator Kinerja ini masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2022

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kecamatan Tomoni	Nilai LAKIP	62	63	54,05 (CC)	-	87,17	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

a. Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk tahun 2022 belum dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk tahun 2021 nilai LAKIP Kecamatan Tomoni adalah 54,05 (CC) dari target 62, ini berarti bahwa hasil yang dicapai belum maksimal, karena belum mencapai target yang telah ditentukan, oleh sebab itu, masih diperlukan banyak perbaikan untuk dapat mencapai target pada tahun 2022.

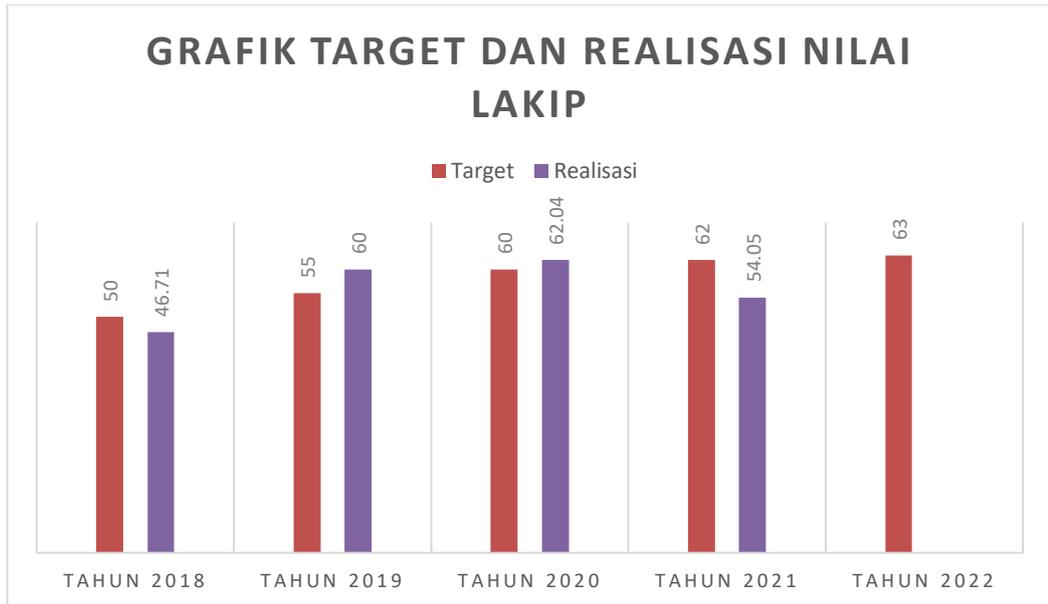
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	Nilai Score LAKIP (n-1)	2017	50	44,24	88%	Tinggi
2		2018	50	46,71	93%	Sangat Tinggi
3		2019	55	60	109%	Sangat Tinggi
4		2020	60	62,04	103%	Sangat Tinggi
5		2021	62	54,05	87,17	Tinggi
6		2022	63	-	-	

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian



Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2018 sampai tahun 2022 bahwa pada tahun 2018 Nilai Skor LAKIP yang diperoleh 46,71 dengan kategori C. pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan memperoleh nilai 60,00 dengan kategori B. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dengan nilai 62,04 dengan Kategori B, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan memperoleh nilai 54,05 dengan kategori CC. sehingga dapat disimpulkan, perolehan nilai LAKIP kantor Kecamatan Tomoni secara umum mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sehingga harus dilakukan upaya-upaya agar dapat meningkatkan kembali nilai Lakip di tahun selanjutnya.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2021		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan tomoni	Nilai Score LAKIP (n-1)	62	54,05	67

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu Skor LAKIP 54,05 dengan kategori CC. Nilai SAKIP yang diraih Tahun 2021 ini menunjukkan trend yang kurang positif dimana menurun dari tahun sebelumnya.

4. **Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

- 1) Ada beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian indikator tersebut yaitu
 - a. Kurangnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan.

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

NO	Jabatan	Hasil Analisis Jabatan		Kondisi saat ini		
		Struktural	Pelaksana	Struktural	Pelaksana	
					PNS	Non PNS
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-
3	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	4	1	1	1
4	Kasubag Umum dan Keuangan	1	5	1	4	2
5	Kasi Pemerintahan Umum	1	4	1	1	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	4	1	1	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	4	1	2	0
8	Kasi Pelayanan Umum	1	4	1	1	3
JUMLAH		8	25	8	10	8
TOTAL		33		26		

Sumber : Dokumen ANJAB dan ABK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan syarat pemangku jabatan pelaksana pada Kantor Kecamatan Tomoni belum sesuai dengan hasil analisis jabatan Kecamatan Tomoni yang dibuat oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Luwu Timur karena sebagian jabatan pelaksana masih diisi oleh Non PNS (tenaga upah jasa).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Tomoni adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan.

❖ **Hambatan :**

- a) Keterbatasan data dan informasi dari masing-masing sub bagian dan kepala seksi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga seringkali penyusunan dokumen perencanaan mengalami keterlambatan.
- b) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

❖ **Solusi:**

- a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait dalam hal ini masing-masing Seksi dan Sub Bagian.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen RKA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah RKA-SKPD Pokok dan RKA-SKPD Perubahan.

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen DPA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen DPA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah DPA-SKPD Pokok dan DPA-SKPD Perubahan.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ **Hambatan/Kendala** : Keterlambatan pengumpulan data untuk bahan LAKIP dari Kepala Seksi.

❖ **Solusi** : Menekankan kepada kepala seksi untuk segera menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di kantor kecamatan tomoni sebanyak 29 orang (dengan kelurahan). Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di kantor Kecamatan Tomoni.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target dari sub kegiatan ini adalah barang yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja di kantor kecamatan tomoni dilaksanakan dengan persentase 100%.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).

b) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.

- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- ❖ **Hambatan/Kendala**
Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :
 - a) Data Los dan Kios masih belum akurat;
 - b) Masih sering terjadi tunggakan dalam pembayaran pajak retribusi;
 - ❖ **Solusi**
Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :
 - a) Melakukan pemutakhiran data kios dan los sebagai bahan dalam melakukan pemungutan pajak retribusi;
 - b) Secara rutin melakukan penagihan dalam rangka memaksimalkan pemungutan retribusi.
- 5) Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
- a. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ **Hambatan/Kendala** : kurangnya anggaran dalam pelaksanaan bimtek sehingga terdapat ASN yang tidak bisa di fasilitasi untuk mengikuti bimtek.
 - ❖ **Solusi** : menambahkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan bimtek di perubahan anggaran dan di anggaran pokok tahun 2023.
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - c. Penyediaan bahan logistic kantor

- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Fasilitasi kunjungan tamu;
- g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- b) Keterbatasan Anggaran.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- c) Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder.
- d) Memaksimalkan anggaran yang telah di sediakan.

- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf.

- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).

- b) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.
- c) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.
- d) Terlambatnya penginputan melalui Aplikasi pengadaan barang dan jasa.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
 - b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
 - c) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.
 - d) Melakukan percepatan penginputan proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
- b) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.
- c) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
 - b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
 - c) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
 - b) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.
- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu pada umumnya kegiatan yang

apa pada program Penunjang Urusan Permerintah Daerah berjalan dengan baik.

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 adalah sebesar Rp.5,036,590,550,-. Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp.4,899,730,433,- dengan capaian **97,28%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET TRIWULAN I, II, III, IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022	Capaian (%)
			(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
				(6/5*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	4,699,995,397	4,569,286,783	97,22%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,961,500	9,820,400	98.58%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,413,500	2,373,400	98.34%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,165,500	2,134,900	98.59%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,165,500	2,128,100	98.27%
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,217,000	3,184,000	98.97%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,895,245,677	2,857,045,103	98.68%

	- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2,887,234,677	2,849,074,103	98.68%
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8,011,000	7,971,000	99.50%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,985,000	1,969,900	99.24%
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,985,000	1,969,900	99.24%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	28,980,000	24,965,000	86.15%
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	28,980,000	24,965,000	86.15%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,081,750	31,921,500	88.47%
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,001,750	4,941,500	98.80%
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31,080,000	26,980,000	86.81%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513,663,750	502,707,619	97.87%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,085,350	6,077,000	99.86%
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22,750,000	22,420,000	98.55%
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56,416,800	48,902,975	86.68%

	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,286,600	14,285,600	99.99%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8,520,000	8,475,000	99.47%
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	160,950,000	160,892,500	99.96%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244,655,000	241,654,544	98.77%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	570,450,000	559,550,000	98.09%
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	530,250,000	519,750,000	98.02%
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,200,000	39,800,000	99.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	476,943,220	420,298,296	88.12%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,486,860	27,146,400	98.76%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,656,360	46,251,896	97.05%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,500,000	8,500,000	100.00%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	393,300,000	338,400,000	86.04%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166,684,500	161,008,965	96.60%

	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,510,400	74,941,465	99.25%
	Pemeliharaan Mebel	4,979,100	4,970,000	99.82%
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,760,000	17,760,000	100.00%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68,435,000	63,337,500	92.55%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,745,500	2,745,000	99.98%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2,745,500	2,745,000	99.98%
	- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,745,500	2,745,000	99.98%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	272,842,800	266,978,950	97.85%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	97,169,900	96,639,050	99.45%
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16,355,900	15,921,500	97.34%
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	80,814,000	80,717,550	99.88%

	Kecamatan			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	175,672,900	170,339,900	96.96%
	- Pembangunan Sarana dan Pra sarana	150,742,900	149,909,900	99.45%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24,930,000	20,430,000	81.95%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8,999,213	8,945,700	99,41%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5,999,768	5,966,500	99.45%
	- Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2,999,793	2,994,500	99.82%
	- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,999,975	2,972,000	99.07%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2,999,445	2,979,200	99.33%
	- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan	2,999,445	2,979,200	99.33%

	Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18,158,900	18,133,000	99.86%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18,158,900	18,133,000	99.86%
	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18,158,900	18,133,000	99.86%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33,848,740	33,641,000	99.39%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	33,848,740	33,641,000	99.39%
	-Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6,648,950	6,512,500	97.95%
	-Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10,203,500	10,133,500	99.31%
	-Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16,996,290	16,995,000	99.99%
	TOTAL BELANJA	5,036,590,550.00	4,899,730,433.00	97.28%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tomoni Tahun 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tomoni Tahun 2022 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 115,42 dari target 79. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Nilai LAKIP belum bisa digambarkan capaiannya disebabkan penilaian LAKIP untuk Tahun 2022 baru akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023. Pada tahun 2022 Kecamatan Tomoni telah merealisasikan Anggaran Belanja Rp. 4,899,730,433 dari pagu anggaran sebesar 5,036,590,550 atau setara dengan 97,28% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Tomoni telah optimal.

Pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kecamatan Tomoni meliputi :

1. Keterbatasan data. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
2. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum

sesuai dengan definisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP). Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.

3. Pengembangan kelembagaan pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada masa-masa tertentu saja selama kegiatan itu berjalan (ada anggaran).

❖ Langkah Antisipatif :

1. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
3. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimtek/diklat.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Tomoni, Februari 2023

CAMAT TOMONI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Catur Dyan Sintawati'.

CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
NIP. 19750901 200312 2006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- i. PERJANJIAN KINERJA
- ii. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU